

Pengaruh Sistem Kebijakan Social Credit Dalam Aspek Hukum Pada Etika Dan Budaya Masyarakat China

Hillaryana Epriscamayeni Bandur, Cindy Louisa, Haikal Muhammad Gibran;
Universitas Pradita, hillaryana.epriscamayeni@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: China is a unitary state that adheres to a communist democratic system of government with a Republican form of government. The Republic of China is also the second most populous country in the world with 1.43 billion people, so it is not easy to manage such a large population. The Chinese government announced a policy in 2014, the Social Credit System. This Social Credit System aims to control the behavior of every citizen of Chinese society. China is the only country that implements this policy, this policy also aims to make people obey the rules. This research uses a qualitative method by collecting data from analyzing related documents and news. The social credit policy implemented in China with a concept that has existed for a long time. This policy has a real impact on society with the example of Dandan Fan and Xu Xiaodong who have opposite fates. Dandan Fan benefited from a high social credit score due to his compliance with the law while Xu Xiaodong received many restrictions on public facilities and social sanctions due to his courage to express one of China's martial arts, Kung Fu. The impact of the social credit policy system on the ethics and culture of Chinese society affects the impact on public compliance with the law, the impact on social life and community interaction patterns, the impact on public information disclosure carried out by the government to disclose social credit scores and the last is the individual freedom of the community. Whereas in the Chinese Constitution in articles 33, 35, 38, 40, 41, which mainly discuss freedom of speech, respect for the dignity of each individual of society and the right to criticize, so it is very clear that this policy is very contrary to the Chinese Constitution that has been enacted.

KEYWORDS: China, Social Credit System, Legal, Ethical and Cultural Aspects

ABSTRAK: China merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan demokrasi komunis dengan bentuk pemerintahan Republik. Republik China juga merupakan negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia dengan jumlah 1,43 miliar jiwa, sehingga tidak mudah untuk mengatur penduduk sebanyak itu. Pemerintah China mengumumkan sebuah kebijakan pada tahun 2014 yaitu Sistem Kredit Sosial. Sistem Kredit Sosial ini bertujuan untuk mengontrol tingkah laku setiap warga masyarakat China. China merupakan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan ini, Kebijakan ini juga bertujuan agar masyarakat dapat menaati peraturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data hasil menganalisis dokumen dan berita terkait. Kebijakan sosial kredit yang diterapkan di China dengan konsep yang sudah ada sejak dahulu. Kebijakan ini memiliki dampak nyata pada masyarakat dengan contoh yaitu Dandan Fan dan Xu Xiaodong yang memiliki nasib bertolak belakang. Dandan Fan mendapatkan banyak keuntungan dari skor sosial kredit yang tinggi akibat

kepatuhannya terhadap hukum sedangkan Xu Xiaodong mendapatkan banyak pembatasan fasilitas publik serta sanksi sosial akibat dari keberaniannya mengukapkan salah satu seni bela diri China yaitu Kung Fu. Dampak dari sistem kebijakan sosial kredit terhadap etika dan budaya masyarakat China berpengaruh pada dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dampak pada kehidupan sosial dan pola interaksi masyarakat, dampak pada keterbukaan informasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengungkapkan skor sosial kredit serta yang terakhir adalah kebebasan individu masyarakat. Padahal pada Konstitusi Tiongkok pada pasal 33, 35, 38, 40, 41 yang secara garis besar membahas mengenai kebebasan berpendapat, penghargaan martabat setiap individu masyarakat dan hak mengkritik, sehingga terlihat sangat jelas bahwa kebijakan ini sangat bertentangan dengan Konstitusi Tiongkok yang telah berlakunya tersebut.

KATA KUNCI: China, Sistem Kredit Sosial, Aspek Hukum, Etika dan Budaya

I. PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan hidupnya dengan aman dan tenang. Ketika pemerintahan menjalankan suatu kebijakan untuk mengatur setiap tingkah laku masyarakatnya, menjadi sebuah pertimbangan apakah tindakan tersebut akan menjadi sebuah bencana bagi negara tersebut atau bahkan akan menjadi sebuah kebijakan yang tepat bagi negara tersebut untuk mengatur setiap tatanan negara. Menurut Aaron O'Neill, China merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia sebesar 1,4 miliar jiwa setelah pada tahun 2022 India mendahului China yang merupakan negara dengan populasi terbesar saat itu. Kemudian menurut Stephen McDonnell, China juga merupakan negara komunis yang tatanan sosial ekonominya terstruktur sebagai kepemilikan bersama dan tidak ada kelas sosial, uang maupun negara. Sehingga ada pembatasan dari beberapa tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat China. Maka dari itu, pemerintah China membuat sebuah kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengatur setiap tingkah laku masyarakatnya itu melalui kebijakan SSC (System Social Credit).

Sistem Social Credit yang hanya berlaku di China ini menjadi sebuah topik yang cukup tidak masuk akal bagi sebagian orang di suatu negara. Sistem ini diperkenalkan oleh pemerintah China pada awal tahun 2014. Alasan kuat pemerintah China membuat sistem kredit sosial ini adalah karena hukum menurut pemerintah China sistem social credit

ini dibutuhkan untuk membangun kepercayaan. Menurut Mareike Ohlberg, tujuan lain dari system credit social ini berdasarkan laporan media tiongkok adalah mengembalikan “kepercayaan sosial” dan kejujuran Masyarakat tiongkok. Sistem Kredit Sosial China bukanlah satu sistem tunggal tetapi serangkaian proyek eksperimen yang sangat berbeda. Ide umumnya adalah bahwa pemerintah China mencoba menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pengaturan sosial, dengan cara yang mirip dengan apa yang dilakukan perusahaan di dunia Barat (Creemers, 2018). Ada beberapa tujuan lain dibuatnya sistem kredit sosial ini seperti mendorong masyarakat taat pada hukum, menyadarkan masyarakatnya untuk membangun kebiasaan dan etika yang baik, sebagai alat untuk memfasilitasi pengawasan dan pengendalian sosial, dan masih banyak lagi.

Menurut Sarah Jakob , Sistem kredit sosial China, dengan definisi luasnya, adalah serangkaian basis data dan inisiatif yang memantau dan menilai kepercayaan individu, perusahaan, dan entitas pemerintah. Setiap entri diberi skor kredit sosial, dengan hadiah bagi mereka yang memiliki peringkat tinggi dan hukuman bagi mereka dengan skor rendah. banyak sekali pro dan kontra terkait sistem ini yang jika dilihat dari kacamata masyarakat kurang menguntungkan bahkan sangat mengganggu. Berdasarkan hasil analisis industry HIS Markit, kamera cctv yang paling banyak terpasang ada di negara China. Pada tahun 2018, Pemerintah China bahkan memasang sekitar 200 juta CCTV disetiap penjuru China untuk memantau pergerakan masyarakatnya Ketika pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia meningkatkan investasi mereka pada jaringan keamanan, ratusan juta lebih kamera pengawas ditargetkan terpasang pada 2021 - dan kebanyakan dari kamera CCTV itu akan berada di China (Vincent Ni & Yitsing Wang, 2020).

Menurut kacamata hukum di China dengan ideologi komunis, sistem Credit Score tidak melanggar hukum apapun. Sistem kredit sosial berada pada tingkat tertinggi, didorong oleh Dewan Negara, yang saat ini diketuai oleh Perdana Menteri Li Keqiang. Ini adalah badan administratif paling kuat dalam pemerintah Cina. Dalam mengelola

database ini dibantu oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), People's Bank of China (PBOC) dan sistem pengadilan negara (Amanda Lee, 2020). Ini adalah badan kebijakan makroekonomi, segera berada di bawah Dewan Negara, dan memiliki campuran dari apa yang di negara lain disebut Treasury dan Reserve / Central Bank Powers. People's Bank of China (PBoC) juga memainkan peran penting di tingkat kebijakan tertinggi.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh The Washington Post, sebanyak 80% dari 2.209 penduduk China yang diwawancara berpendapat bahwa mereka mendukung program Social Credit karena jika mereka memiliki Credit Score yang baik segala aspek kehidupan mereka terjamin akan baik dari segi mendapatkan banyak keuntungan bahkan sampai cara negara untuk menaikkan kualitas hidup masyarakat dan memotivasi perilaku taat dan jujur pada diri Masyarakat.

Sistem Kredit Sosial di China tidak hanya merupakan mekanisme pengawasan yang terpusat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan moral yang mendalam, yang bertujuan untuk meng-institusionalisasi standar moral dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku warga negara melalui pemberian insentif atau sanksi, maka dari itu tujuan penulis dalam jurnal ini adalah ingin mengidentifikasi dengan melihat dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik apakah sistem social credit di china ini berpengaruh kepada moral dan budaya di negeri tirai bambu ini.

II. METODE

Menurut Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara penting bagi peneliti yang digunakan untuk mendapatkan tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang di teliti. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada sekadar melihatnya dengan tujuan untuk digeneralisasikan (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini adalah pendekatan yang tepat untuk

memahami pengaruh kebijakan pada aspek sosial dan budaya karena memungkinkan analisis mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan reaksi individu terhadap sistem tersebut. Metode kualitatif memfokuskan pada interpretasi subjektif dan dapat melibatkan analisis dokumen dan studi kasus untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendetail. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif karena penulis mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen dan berita terkait dengan topik yang dibicarakan. Selain itu juga, pengambilan dari studi pustaka.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Social Credit

Konsep dasar social credit adalah sistem penilaian yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok (Sayid Muhammad Rifqi Noval, 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol dan menilai perilaku warga negaranya. Sistem ini memberikan skor kepada individu, perusahaan, dan entitas pemerintah berdasarkan perilaku sosial, ekonomi, dan politik mereka. Skor tinggi dapat memberikan berbagai keuntungan, sedangkan skor rendah dapat mengakibatkan hukuman seperti larangan bepergian atau kesulitan mendapatkan pinjaman.

1. Pengertian Social Credit

Sistem Social Credit adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur perilaku individu dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan etika sosial dengan memberikan skor yang mempengaruhi akses individu terhadap layanan sosial, kesempatan bepergian, dan peluang ekonomi. Skor ini ditetapkan berdasarkan perilaku yang dicatat dan dipantau melalui berbagai cara, termasuk penggunaan teknologi seperti Closed-Circuit Television (CCTV).

Lebih jauh lagi, konsep Social Credit juga mencakup ide jaminan sosial, yang merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh masyarakat atau negara untuk melindungi warga dan keluarganya dari

dampak gangguan ekonomi atau sosial yang tidak terhindarkan. Ini mencakup program bantuan sosial, tabungan hari tua, asuransi sosial, dan tanggung jawab pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada karyawan.

Sejarah pembahasan tentang Social Credit telah berkembang dari perspektif tradisional hingga pendekatan yang lebih modern yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pengaturan sosial dengan biaya pengawasan yang minimal. Metode evaluasi kredit yang umum digunakan mencakup sistem pakar, model ekonometrik, teknik kecerdasan buatan (AI), dan bentuk kombinasi dari metode-metode tersebut. Indeks evaluasi bervariasi tergantung pada subjek yang dievaluasi, apakah itu negara, perusahaan, atau individu.

2. Sejarah dan Perkembangan Social Credit

Munculnya kebijakan ini bukan semata-mata karena hanya ingin mengatur tingkah laku dari masyarakat akan tetapi ada sejarah panjang dibalik itu. Menurut laporan Wired pada tahun 2014 tentang perencanaan sistem kredit sosial di Tiongkok, terdapat catatan yang mengungkap bahwa "menjaga kepercayaan tidak dihargai secara memadai, sementara harga untuk menghancurkan kepercayaan justru cenderung lebih rendah." Artinya, dalam konteks ini, individu yang mempertahankan kepercayaan seringkali tidak diberi penghargaan atau insentif yang layak, sementara mereka yang menyalahgunakan kepercayaan atau melanggar norma-norma sosial tidak dihukum secara memadai.

Menurut Mareike Ohlberg, Shazeda Ahmed dan Bertram Lang pada tahun 2017, seorang peneliti dari Mercator Institute For China Studies (MERICS) yang berbasis di luar Tiongkok, menyatakan bahwa masyarakat Tiongkok mengalami masalah dengan kepercayaan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepercayaan terhadap makanan dan lingkungan yang tercemar hingga masalah terkait upah pekerja. Tingginya jumlah orang di Tiongkok yang melanggar kepercayaan, seperti tidak memenuhi janji pembayaran atau gagal mengembalikan

hutang, tanpa menerima hukuman yang tegas dari masyarakat atau pemerintah, telah menyebabkan munculnya istilah "Lao Lai" untuk merujuk kepada individu yang gagal membayar utang atau menepati janji.

Semakin bertambahnya jumlah individu yang termasuk dalam kategori "Lao Lai" ini telah membuat pemerintah Tiongkok menyadari potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Sebagai respons terhadap isu ini, pemerintah Tiongkok mengemukakan gagasan tentang Sistem Kredit Sosial pada tahun 2014, dengan rencana penerapan yang dijadwalkan mulai efektif pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kepercayaan dan kepatuhan sosial dalam rangka memperkuat struktur ekonomi dan sosial negara.

Meskipun pengumuman resmi tentang sistem kredit sosial terintegrasi di Tiongkok dilakukan pada tahun 2014, akar dari konsep ini telah ada selama berabad-abad, bahkan bisa dikatakan ribuan tahun. Menurut Drew Donnelly, seorang Spesialis Regulasi Senior dalam artikel Horizon, Filosofi yang mendasari kredit sosial dapat ditelusuri kembali ke masa "negara-negara yang bertikai" dalam sejarah Tiongkok, di mana aliran-aliran pemikiran seperti Konfusianisme, Mohisme, dan Legalisme bersaing untuk dominasi

Konfusianisme, yang dipelopori oleh Konfusius pada abad ke-5 SM, menekankan hubungan holistik antara kesejahteraan individu dan karakter yang baik, serta keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Mohisme, yang diusung oleh Mozi pada periode yang sama, mengadvokasi untuk saling peduli secara merata di antara semua manusia dan menekankan perlunya perlakuan yang tidak memihak. Di sisi lain, aliran Legalisme muncul sekitar abad ke-4 sampai ke-3 SM, menekankan pentingnya hukum yang ketat dari pemerintah untuk menjaga ketertiban sosial.

Meskipun Legalisme bisa dikatakan menang pada masanya, ketiga aliran ini memberikan pengaruh yang signifikan pada dinasti pertama Tiongkok, Qin (221-206 SM), di mana sistem meritokrasi diterapkan dalam birokrasi kekaisaran. Namun, sistem ini belum sempurna dan

hanya berlaku untuk pegawai negeri, tanpa adanya "nilai" yang jelas (Drew Donnelly, 2024).

Pada abad ke-20, Tiongkok mulai mengembangkan sistem pencatatan publik, seperti sistem hukou yang mulai diterapkan secara modern pada tahun 1958. Dàng'àn, yang merupakan kumpulan catatan terkait individu, mencatat berbagai aspek seperti riwayat kerja, pendidikan, dan hukuman. File ini berdampak pada berbagai keputusan penting dalam kehidupan seseorang, seperti promosi dan akses terhadap paspor (Drew Donnelly, 2024).

Gagasan tentang sistem kredit sosial modern dimulai pada akhir tahun 1990-an, dengan pembangunan basis data kredit pertama oleh Bank Rakyat Tiongkok. Pada tahun 1999, pemerintah Tiongkok mulai mengusulkan ide-ide tentang manajemen kredit nasional yang terpusat, dengan fokus awal pada masalah ekonomi seperti gagal bayar utang dan pelanggaran kontrak. Selanjutnya, uji coba sistem kredit regional dimulai, seperti yang terjadi di Shanghai pada tahun 2000 (Drew Donnelly, 2024).

Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Tiongkok semakin menekankan pentingnya pengembangan sistem kredit sosial yang komprehensif, yang mencakup aspek ekonomi dan non-ekonomi. Perkembangan signifikan termasuk pendirian Pusat Referensi Kredit pada tahun 2006 dan pembentukan daftar hitam dan daftar merah pada tahun 2016 (Drew Donnelly, 2024). Seiring waktu, sistem ini semakin diperluas dan diuji coba di berbagai kota, dengan fokus pada pengembangan teknologi dan analisis data yang lebih canggih.

Pandemi Covid-19 juga telah mempengaruhi perkembangan sistem kredit sosial, dengan pemerintah Tiongkok menyesuaikan beberapa aspek sistem untuk menghadapi dampak pandemi ini. Pada Desember 2020, draf UU Kredit Sosial dirilis untuk konsultasi internal, menandai langkah lebih lanjut dalam standarisasi dan pengembangan sistem ini (Drew Donnelly, 2024).

B. Peristiwa yang Dialami Masyarakat China

Dalam kehidupan masyarakat China, terdapat perbedaan dampak yang sangat signifikan akibat dari kebijakan social credit system ini. Perbedaan dampak ini sangat tampak jelas dari hasil akhir yang diterima. Kisah tersebut berdasarkan dari pengalaman dua orang masyarakat China, yaitu Dandan Fan dan Xu Xiaodong. Perbedaan dampak tersebut dapat terlihat dengan jelas seberapa besar pengaruh dari sistem ini kepada kehidupan seseorang.

Menurut Matthew Carney, Dandan Fan adalah seorang perempuan Tiongkok modern yang sangat mencolok. Sebagai seorang profesional pemasaran, dia rajin dan sejahtera dalam banyak hal, dia adalah warga Tiongkok yang menjadi contoh. Namun, Dandan diamati 24 jam sehari melalui jaringan luas 200 juta kamera CCTV di seluruh Tiongkok, memastikan tidak ada sudut gelap di mana pun untuk bersembunyi. Setiap langkah yang dia ambil, setiap tindakannya yang besar atau kecil bahkan apa yang dia pikirkan dapat dilacak dan dinilai. Meskipun banyak yang mungkin merasa terganggu dengan tingkat pengawasan ini, Dandan mengatakan bahwa itu baik-baik saja baginya. Baginya, keberadaan kamera CCTV memberikan rasa aman dan stabilitas dalam masyarakat. Dandan sadar bahwa sistem kredit sosial bukanlah sistem yang sempurna, tetapi dia percaya bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengelola negara yang kompleks dengan populasi terbesar di dunia.

Selain itu, Dandan juga mendapat manfaat dari sistem ini karena perilaku keuangannya yang baik. Dengan skor kredit sosial yang tinggi, Dandan dapat menikmati berbagai imbalan dari perkembangan cepat Tiongkok, seperti akses ke hak istimewa khusus. Namun, tidak hanya perilaku keuangan yang dipengaruhi oleh sistem ini, tetapi juga hubungan sosialnya. Siapa teman dan keluarga Anda, serta siapa yang Anda pacari dan akhirnya jadi pasangan hidup, juga akan mempengaruhi skor kredit sosial Anda. Dandan menikah karena cinta, tetapi dia memilih pasangan yang tepat untuk menjaga skor kredit sosialnya tetap tinggi. Suaminya, Xiaojing Zhang, adalah seorang pegawai negeri di departemen keadilan dan seorang kader yang setia

pada partai. Keberadaan pasangan yang memiliki skor kredit sosial yang tinggi ini memberikan manfaat tambahan bagi Dandan, membantu memperkuat status sosial dan ekonomi mereka dalam masyarakat.

Kemudian dampak buruk juga terjadi pada Xu Xiaodong. Menurut Nicolas Atkin, artikel South China Morning Post, Xu Xiaodong adalah seorang petarung MMA (Mixed Martial Arts) asal China yang dikenal dengan julukan "Mad Dog". Dia mendapatkan julukan ini karena keberaniannya dalam mengekspos kepalsuan dalam seni bela diri tradisional Tiongkok, terutama Kung Fu. Xu memulai misi kontroversialnya untuk mengungkap ketidakmampuan sejumlah "master" Kung Fu yang dihormati di China dengan mengadakan pertandingan bela diri langsung melawan mereka. Dalam pertandingan-pertandingan ini, Xu berhasil mengalahkan beberapa "master" Kung Fu terkenal dalam waktu yang sangat singkat, yang menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam pertarungan sesungguhnya.

Masalah bermula ketika aksi-aksi kontroversial Xu Xiaodong dalam mengungkap kepalsuan Kung Fu tersebut menarik perhatian otoritas Tiongkok. Tindakannya dianggap sebagai penghinaan terhadap budaya dan warisan bela diri Tiongkok, yang dihormati secara luas di negara tersebut. Pemerintah dan media negara bahkan melabelinya sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan nilai-nilai tradisional China. Akibatnya, Xu menjadi sasaran tekanan dan hukuman yang meluas dari pemerintah, termasuk sensor dari media Tiongkok dan pembatasan perjalanan. Selain itu, skor sosial kreditnya turun drastis, yang mengakibatkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, seperti akses terhadap transportasi, layanan publik, dan bahkan kehidupan finansialnya.

Tekanan yang dialami Xu Xiaodong tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari beberapa "master" Kung Fu yang merasa tersinggung dan marah dengan pengeksposan ketidakmampuan mereka. Beberapa dari mereka bahkan menggugat Xu Xiaodong secara hukum, yang mengakibatkan dia diwajibkan membayar denda besar sebagai kompensasi. Situasi ini semakin memperparah kondisi Xu, yang akhirnya memilih untuk menyampaikan pengalamannya kepada dunia

luar melalui siaran langsung menggunakan VPN, mengungkapkan kesulitan dan tekanan yang dialaminya di Tiongkok.

Akhirnya, tekanan yang terus-menerus yang dialami di Tiongkok mendorong Xu Xiaodong untuk memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan di luar negeri. Dia mengumumkan keinginannya untuk pindah ke Australia, yang dianggapnya sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi dirinya dan melanjutkan misinya dalam mengekspos kepalsuan dalam seni bela diri. Dengan meninggalkan Tiongkok dan mencari perlindungan di negara lain, Xu berharap untuk mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk melanjutkan perjuangannya tanpa terus-menerus diancam dan dibatasi oleh otoritas Tiongkok. Keputusannya untuk pindah ke Australia juga merupakan tindakan penolakan terhadap sistem sosial kredit yang menghambat kehidupannya di Tiongkok, dan merupakan langkah menuju kebebasan yang lebih besar dalam mengekspresikan pendapat dan menjalankan misinya.

Berdasarkan kisah kedua orang tersebut ditemukan perbedaan yang sangat terlihat jelas bahwa kebijakan ini dapat merubah nasib hidup seseorang. Kebijakan ini sebenarnya bisa memberikan dampak yang positif dan bisa juga negatif. Maka dari itu, maksud dari pemerintah adalah bagaimana masyarakatnya mampu menjaga tingkah laku mereka dan memberikan berupa imbalan atas apa yang telah diperbuatnya. Harapannya kebijakan ini bertujuan agar seluruh warga lebih tertib dan patuh untuk negara yang lebih baik.

C. Pengaruh Sistem Kebijakan Social credit Terhadap Etika Masyarakat China

1. Dampak pada Kepatuhan Hukum

Sistem sosial kredit di china dirancang sebagai mekanisme yang memberikan penghargaan dan hukuman kepada warga negara berdasarkan perilaku dan kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan. Dengan menggunakan skor atau poin sebagai tolak ukur

kredibilitas dan integritas dalam kehidupan sosial, sistem ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih disiplin dan dapat dipercaya.

Namun lagi-lagi, sistem ini juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan isu privasi dan hak-hak warga sipil. Kekhawatiran muncul mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi dan dampaknya terhadap perlindungan data pribadi warga negara. Selain itu, sistem kredit sosial juga dikritik karena dapat membatasi aktivitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan.

Secara keseluruhan, sistem kredit sosial di China dianggap sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan sistem sosial kredit memang sudah terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat warga negara terhadap aspek hukum dan peraturan, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya patuh terhadap hukum yang berlaku.

Tetapi tidak sedikit pula warga negara China menganggap sistem sosial kredit ini adalah salah satu ancaman internal. Hal ini karena kebijakan SSC dianggap meresahkan, kekhawatiran masyarakat terhadap data pribadi penting yang takut disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, dan sebagian besar warga negara merasa tidak nyaman bersosialisasi karena adanya paksaan dari sistem sosial kredit ini (Sayid Muhammad Rifqi Noval, 2020).

Namun bila dilihat dari segi dampak SCS terhadap kepatuhan masyarakat dalam aspek hukum memang sangat efektif, karena masyarakat mau tidak mau untuk mematuhi hukum yang berlaku karena bila mereka melakukan pelanggaran ringan pun hukuman yang diterima akan sangat merepotkan dan merugikan diri mereka sendiri.

Berdasarkan Pasal 33 dari Konstitusi Republik Rakyat Cina, semua individu yang memiliki kewarganegaraan Republik Rakyat Cina diakui sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Pasal ini menegaskan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya, serta menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum, sekaligus harus mematuhi tugas

yang ditentukan oleh Konstitusi dan undang-undang lainnya (Konstitusi Tiongkok, 2018). Namun, pelaksanaan Sistem Kebijakan Social Credit di China telah menimbulkan dampak yang serius terhadap etika masyarakat dan kepatuhan hukum. Meskipun semua warga negara dianggap sederajat di depan hukum, sistem ini dapat mengakibatkan diskriminasi dan penilaian subjektif terhadap individu berdasarkan data pribadi mereka. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghasilkan masyarakat yang lebih waspada dan curiga terhadap sesama, sehingga mengancam prinsip kesetaraan dan keadilan yang dipegang teguh oleh Konstitusi.

B. Implikasi pada Kehidupan Sosial

Pada implikasi ini berarti bagaimana kebijakan Social Credit ini mencakup perubahan dalam cara setiap masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya melalui komunikasi serta cara berhubungan baik secara individu maupun kelompok. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan rasa solidaritas antarmasyarakat.

Berdasarkan Pasal 35 dari Konstitusi Republik Rakyat Cina, setiap warga negara dijamin hak kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, prosesi, dan demonstrasi (Konstitusi Tiongkok, 2018). Hak-hak ini merupakan fondasi dari demokrasi dan kebebasan berpendapat di negara tersebut. Namun, penerapan Sistem Kebijakan Social Credit di China memiliki dampak signifikan terhadap etika masyarakat dan realisasi hak-hak tersebut. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan tersebut, sistem ini dapat membatasi kebebasan berbicara dan berserikat dengan cara memantau dan menilai aktivitas sosial dan perilaku individu. Hal ini menciptakan atmosfer di mana warga merasa terkekang dalam menyuarakan pendapat atau mengorganisir diri untuk tujuan tertentu, karena khawatir akan konsekuensi negatif terhadap skor kredit mereka. Implikasi dari sistem ini terhadap kehidupan sosial adalah potensi penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik, serta pengurangan diskusi terbuka dan pertukaran ide. Dengan demikian, Sistem Kebijakan Social Credit dapat menghambat perkembangan demokrasi dan pluralisme di masyarakat China.

Berubahnya dalam sosialisasi dalam lingkungan sosial, hal ini dapat berdampak pada cara masyarakat berinteraksi antar individu. Misalnya mereka akan berprasangka dan harus waspada dalam berinteraksi di lingkungan sosial karena adanya pengaruh pada peringkat kredit masyarakat tersebut. Selanjutnya ada dinamika dalam hubungan secara personal. Hal ini juga dapat mempengaruhi dinamika hubungan secara interpersonal dengan kata lain masyarakat lebih memilih berinteraksi pada individu yang menguntungkan, ini juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Dimana masyarakat akan berinteraksi dengan individu lain yang memiliki kredit tinggi dan akan menjauhi individu yang memiliki kredit yang rendah. Maka dari itu, individu yang memiliki peringkat rendah akan sulit untuk menaikkan kreditnya dalam lingkup sosial.

Menurut Bob Widyahartono, ada beberapa poin tentang etika di China yang biasa dilakukan oleh Masyarakat, yaitu:

1. Kewajiban menjunjung tinggi nama keluarga dan tentunya bangsa.
2. Menerima disiplin kerja.
3. Ketakutan berada dalam suasana tak nyaman memasuki masa depan.
4. Orientasi mengelompok, awalnya fungsional dan dengan kemajuan sarana komunikasi, termasuk teknologi informasi, menjadi lintas fungsional.
5. Menumbuhkan rasa saling mendukung atas dasar saling percaya dengan menjunjung tinggi tata krama dan etika.

Masyarakat China mempunyai beberapa aturan dan ajaran pada 5 poin di atas dikarenakan adanya kebijakan dari social credit China yang membuat masyarakat menjadi lebih individualis dan mementingkan orang terdekatnya karena jika sampai salah bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain yang memiliki kredit nya rendah maka akan berpengaruh, baik untuk diri sendiri dan ke keluarga. Pada poin ketiga, tentang ketakutan akan masa depan, mereka berdampak pada mental atau depresi, meningkatkan angka pengangguran serta dengan

dampak lainnya dari dampak sosial credit yang rendah akibat bersosialisasi dengan orang yang mempunyai credit yang rendah juga. Jadi jika berhubungan dengan orang lain yang credit rendah, mereka juga akan ikut turun juga bahkan keluarga yang pernah atau memiliki hubungan yang sama pun akan mendapat dampaknya. Akibat dari rasa takut dan gelisah tentang turunnya kredit yang diperoleh, mereka menjadi terlalu kompetitif sehingga bisa depresi yang justru melakukan hal yang membuat kreditnya turun. Pada poin ke empat, karena biasanya Masyarakat itu berkelompok mereka menjadi terlalu bersaing dan mementingkan individual. Lalu pada poin ke lima, karena adanya jaringan kerja yang saling mendukung dan saling menguntungkan yang didasari kepercayaan, mereka juga menjunjung tinggi tata krama dan etika karena adanya kebijakan ini, masyarakat berusaha untuk menaikkan credit untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi mereka juga ada rasa takut dengan cara yang dilakukan akan merugikan orang lain yang akan berdampak pada hilangnya rasa saling mendukung dan saling percaya membuat tata krama di kehidupan sosial semakin lama semakin hilang.

Implikasi pada bidang sosial lainnya misalnya perubahan perilaku. Penerapan sistem kredit sosial di Tiongkok mempengaruhi perilaku individu dengan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap skor kredit. Individu menjadi lebih memperhatikan norma-norma sosial dan aturan hukum karena mereka menyadari bahwa perilaku mereka dapat mempengaruhi reputasi dan posisi sosial mereka. Hal ini mendorong kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan peraturan yang ada serta membentuk kebiasaan yang lebih baik.

Kedua, Pola interaksi berubah. Implementasi sistem kredit sosial di Tiongkok telah mempengaruhi pola interaksi sosial. Individu menjadi lebih berhati-hati dalam interaksi karena menyadari dampak pada reputasi dan skor kredit mereka. Interaksi antarindividu menjadi lebih formal atau terhambat karena kekhawatiran akan dampak negatif pada skor kredit. Hal ini mencerminkan adaptasi individu terhadap lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh sistem kredit sosial, di mana pertimbangan terhadap penilaian dan reputasi menjadi faktor utama

dalam interaksi sehari-hari. Ketiga, Penguatan Tanggung Jawab Sosial. Sistem ini mendorong partisipasi individu dalam kegiatan positif, seperti sukarela atau penerimaan penghargaan, untuk memperkuat tanggung jawab sosial. Ini memfasilitasi kolaborasi antara individu dan entitas sosial, mempromosikan nilai-nilai kebaikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Potensi Konformitas Berlebihan. Meskipun sistem kredit sosial memberdayakan penguatan norma-norma sosial, risiko terjadinya konformitas berlebihan atau perasaan terkekang dapat menjadi dampak yang relevan. Kekhawatiran akan penilaian negatif dalam konteks sistem ini dapat mempengaruhi individu untuk mengikuti norma-norma yang ditetapkan secara ketat, bahkan jika hal itu bertentangan dengan nilai atau preferensi pribadi mereka. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan implikasi psikologis dari implementasi sistem kredit sosial, serta perlunya mekanisme pengamanan yang memperhatikan keseimbangan antara pemantauan sosial dan kebebasan individu.

D. Dampak Sistem Kebijakan Social

1. Credit Terhadap Budaya Masyarakat China

Dampak dari implementasi sistem kebijakan Social Credit terhadap budaya masyarakat China sangat erat kaitannya dengan masalah kepercayaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sistem ini mencerminkan pergeseran dalam cara masyarakat dan pemerintah Tiongkok memandang dan mengelola kepercayaan, serta bagaimana kepercayaan itu diukur, dihargai, atau bahkan dihukum.

Pertama-tama, sistem Social Credit mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap kurangnya kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Menurut Zhang Lihua, seorang resident scholar di Carnegie-Tsinghua Center dalam artikel *Carnegie Endowment For International Peace*, Sebelum diterapkannya sistem ini, banyak masyarakat di China menghadapi masalah dengan kepercayaan, mulai dari masalah kepercayaan terhadap makanan,

polusi, hingga masalah upah pekerja. Contohnya, banyak orang yang melanggar kepercayaan dengan berhutang namun tidak memenuhi janji untuk membayar tepat waktu atau bahkan sama sekali tidak membayar, tetapi tidak mendapatkan hukuman yang sesuai. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya orang yang dijuluki sebagai "Lao Lai", yaitu orang-orang yang berhutang tetapi tidak mau atau tidak mampu membayar .

Dengan diperkenalkannya sistem Social Credit, pemerintah China berupaya untuk mengatasi masalah kepercayaan ini dengan mengubah paradigma kepercayaan dari sudut pandang budaya dan sosial. Melalui penggunaan teknologi dan data, pemerintah mengumpulkan informasi tentang perilaku individu dan perusahaan, serta memberikan penilaian atau "skor kredit" berdasarkan ketaatan mereka terhadap norma-norma sosial dan hukum.

Konsep ini membawa dampak yang signifikan terhadap budaya masyarakat China. Pertama, itu menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum, karena skor kredit mereka dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai layanan dan hak-hak, seperti perjalanan, pendidikan, dan pekerjaan. Kedua, hal itu memperkuat kontrol sosial, karena masyarakat dapat memantau dan melaporkan perilaku yang dianggap tidak pantas atau melanggar hukum. Ketiga, hal itu mengubah dinamika kepercayaan, di mana kepercayaan tidak hanya dilihat sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai aset yang dapat diukur dan dieksploitasi.

Namun, implementasi sistem Social Credit juga memunculkan kekhawatiran tentang privasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan potensi penindasan terhadap individu atau kelompok yang dianggap tidak patuh oleh pemerintah atau masyarakat. Hal ini menciptakan dilema antara keamanan dan kebebasan individu, serta menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu.

Dengan demikian, sistem Social Credit tidak hanya mencerminkan perubahan dalam cara kepercayaan diukur dan dikelola di Tiongkok, tetapi juga menggambarkan transformasi yang lebih luas dalam budaya dan tatanan sosial masyarakat China.

Nilai-nilai budaya suatu negara memiliki dampak besar pada psikologi dan identitas nasionalnya. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral bagi warga negara, dan pandangan mereka tercermin dalam kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemimpin negara, yang dipengaruhi oleh opini publik dan media. Di Tiongkok, nilai-nilai budaya tradisional memiliki pengaruh yang kuat terhadap jiwa Masyarakat (Zhang Lihua, 2013).

Salah satu nilai inti dalam budaya Tiongkok adalah keharmonisan, yang menekankan koordinasi yang tepat dan seimbang antara berbagai hal. Konsep ini menuntut keseimbangan yang baik antara individu dan lingkungan, serta antara pikiran dan tindakan (Zhang Lihua, 2013). Selain itu, keharmonisan juga melibatkan kesesuaian dan kepantasan dalam bertindak, dengan mengkoordinasikan hal-hal yang berbeda untuk mencapai keseimbangan dan simetri .

Kebajikan, yang merupakan nilai inti dalam Konfusianisme, menekankan pentingnya ikatan kekeluargaan dan hubungan sosial yang erat (Zhang Lihua, 2013). Hal ini tercermin dalam pepatah yang mengatakan bahwa keluarga yang damai akan sejahtera, menunjukkan betapa pentingnya hubungan harmonis dalam masyarakat Tiongkok. Kebajikan juga mencakup nilai-nilai seperti keadilan, sopan santun, kebijaksanaan, kejujuran, kesetiaan, disiplin diri, dan komitmen.

Kebenaran merupakan nilai yang mencerminkan keadilan dan kebenaran objektif. Menurut Konfusius, setiap orang harus mencari apa yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup tidak hanya manfaat individual, tetapi juga manfaat kolektif dan social (Zhang Lihua, 2013). Prinsip ini tercermin dalam pepatah yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya negara, dan bahwa rakyat harus berjuang demi kejayaan negara jika terjadi ancaman dari luar.

Kesopanan menekankan pentingnya sopan santun dan kehati-hatian dalam bertindak. Budaya tradisional Tiongkok menghargai ritual dan tata krama yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-

hari (Zhang Lihua, 2013). Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Kebijaksanaan menuntut seseorang untuk membedakan yang benar dan yang salah, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang lain (Zhang Lihua, 2013). Hal ini mencakup kebijaksanaan dalam memahami orang lain dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kebijaksanaan juga melibatkan pengendalian diri dan kemampuan untuk memajukan kebaikan.

Kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai dalam budaya Tiongkok, yang mencerminkan integritas, kredibilitas, dan kepercayaan. Prinsip ini tercermin dalam pepatah yang menyatakan bahwa orang harus memperoleh kekayaannya secara wajar dan benar (Zhang Lihua, 2013).

Oleh karena itu, kebijakan ini membuka banyak aspek dari kebudayaan yang telah lama dipegang oleh masyarakat China. Masyarakat melihat kebijakan ini sebagai sangat menguntungkan karena mempromosikan nilai-nilai seperti kekeluargaan, kejujuran, dan kebudayaan lainnya yang dianggap fundamental dalam budaya Tiongkok. Kehadiran budaya kekeluargaan memberikan rasa aman kepada masyarakat, sementara penekanan pada kejujuran dan nilai-nilai lainnya memberikan keyakinan bahwa kebijakan ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

3.4.1 Pengaruh Keterbukaan Informasi

Pemberlakuan sistem Social Credit di Tiongkok telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap keterbukaan informasi di masyarakat. Meskipun sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sosial dan etika, dampaknya terhadap keterbukaan informasi telah menjadi subjek perdebatan.

Pertama, implementasi sistem ini telah menghasilkan peningkatan akses pemerintah terhadap data individu. Dengan pengumpulan informasi yang luas tentang perilaku warga, terutama melalui

penggunaan teknologi seperti CCTV dan sistem pemantauan online, pemerintah memiliki akses yang lebih besar terhadap data pribadi individu. Hal ini dapat meningkatkan kekhawatiran akan privasi dan potensi penyalahgunaan data oleh pemerintah.

Di sisi lain, meskipun pemerintah memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, pengaruh keterbukaan informasi bagi masyarakat umum telah menjadi terbatas. Beberapa laporan menyatakan bahwa pelanggaran kebijakan atau skor kredit yang rendah dapat mengakibatkan pembatasan akses terhadap layanan-layanan masyarakat atau bahkan penolakan pekerjaan, seperti yang dialami oleh Mad Dog. Dalam hal ini, masyarakat mungkin menjadi lebih hati-hati dalam berbagi informasi atau mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul dari skor kredit mereka.

Secara keseluruhan, meskipun pemberlakuan sistem Social Credit telah membawa perubahan dalam akses pemerintah terhadap informasi individu, dampaknya terhadap keterbukaan informasi masyarakat secara keseluruhan masih menjadi subjek perdebatan. Terdapat kekhawatiran akan privasi dan potensi penyalahgunaan data oleh pemerintah, sementara pada saat yang sama, masyarakat mungkin menjadi lebih hati-hati dalam berbagi informasi karena takut akan konsekuensi dari skor kredit mereka.

Berdasarkan Pasal 40 dari Konstitusi Republik Rakyat China dijelaskan bahwa kebebasan dan privasi korespondensi warga negara Cina harus dilindungi oleh hukum (Konstitusi Tiongkok, 2018). Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pelanggaran terhadap kebebasan dan privasi ini, kecuali untuk keperluan keamanan nasional, investigasi kriminal, atau keamanan publik. Namun, kebijakan Social Credit yang diterapkan di Cina telah dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Kebijakan ini memungkinkan akses ke data pribadi masyarakat dan dalam kasus seseorang dengan skor kredit rendah, data pribadi serta kesalahan individu dapat dipublikasikan. Hal ini berpotensi merusak kesehatan mental individu dan bisa berdampak negatif bagi orang-orang sekitarnya.

Contoh nyata dampak negatif dari kebijakan Social Credit ini adalah kasus Xu Xiaodong. Xu Xiaodong yang mencoba mengungkap kebenaran tentang beberapa praktik bela diri tradisional Cina yaitu kungfu, mengalami kesulitan hidup setelah mendapat perhatian negatif dari publik dan pemerintah. Pengungkapannya tentang ketidakakuratan beberapa praktik bela diri memicu tanggapan negatif yang mengancam karir dan kesejahteraannya, menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut bisa digunakan untuk menekan opini dan kritik yang berbeda.

2. Perubahan dalam Pola Interaksi Sosial

Penerapan sistem kredit sosial juga telah menyebabkan pengurangan rasa kepercayaan di antara individu-individu dalam masyarakat China. Dengan adanya sistem yang memantau dan menilai setiap tindakan, perilaku, dan interaksi mereka, orang menjadi lebih waspada dan curiga terhadap niat dan motif orang lain. Ini dapat menghilangkan rasa kepercayaan yang mendasar dalam hubungan antarpribadi dan antar anggota masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks kebudayaan kepercayaan, di mana hubungan interpersonal didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati, sistem kredit sosial dapat merusak hubungan ini. Orang mungkin mulai ragu untuk berbagi informasi pribadi atau menyatakan pendapat mereka secara terbuka, karena takut bahwa tindakan tersebut akan berdampak negatif pada skor kredit sosial mereka. Hal ini mengakibatkan terjadinya distansi emosional dan kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam dan berarti.

Penerapan sistem kredit sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pandangan masyarakat China terhadap kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada budaya tradisional dan nilai-nilai yang menjadi kebanggaan negara. Misalnya, dalam konteks kepercayaan terhadap makanan, masyarakat mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam memilih tempat makan atau produsen makanan yang mereka percayai, mengingat bahwa skor kredit sosial dapat dipengaruhi oleh kualitas makanan atau layanan restoran. Hal ini dapat mempengaruhi industri kuliner secara keseluruhan, dengan pemilik

bisnis yang dianggap memiliki skor kredit rendah mungkin mengalami penurunan jumlah pelanggan. Kemudian dalam kehidupan sosial, kehilangan rasa kepercayaan dapat mengurangi solidaritas dan kohesi dalam masyarakat. Orang mungkin lebih cenderung untuk menjaga jarak dan mempertahankan batas-batas pribadi mereka, daripada terlibat dalam kolaborasi atau kerja sama yang erat. Ini dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dan ketegangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan sosial dan pembangunan komunitas yang inklusif.

Selain itu, dalam kebudayaan Kung Fu, di mana keberadaan sistem kredit sosial telah menghasilkan dilema moral dan praktis. Sejumlah praktisi Kung Fu yang terkenal mungkin merasa terancam dengan sistem ini karena mereka harus mempertahankan reputasi mereka untuk mempertahankan skor kredit yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat yang mendukung sistem kredit sosial mungkin percaya bahwa ini adalah cara untuk melindungi budaya dan warisan seni bela diri Tiongkok dengan memastikan bahwa hanya praktisi yang benar-benar terampil dan terhormat yang memiliki skor kredit yang tinggi. Dalam hal kepercayaan terhadap nilai-nilai yang menjadi kebanggaan negara China, sistem kredit sosial juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap individu atau entitas yang dianggap tidak mempromosikan atau bahkan menentang nilai-nilai tersebut. Misalnya, individu atau organisasi yang dianggap "anti-patriotik" atau "anti-Tiongkok" dalam pandangan pemerintah atau masyarakat mungkin menghadapi penolakan atau boikot dari masyarakat yang sadar akan skor kredit sosial mereka. Ini menciptakan tekanan untuk mematuhi norma-norma sosial dan politik yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai individu atau kebebasan berekspresi.

Secara keseluruhan, sistem kredit sosial yang ketat dapat mengganggu ikatan sosial yang mendasari kepercayaan dan saling pengertian di antara individu-individu dalam masyarakat China. Dampaknya dapat terasa jauh setelah penerapan kebijakan, mempengaruhi segala aspek kehidupan sehari-hari dan mengubah

dinamika budaya kepercayaan yang telah lama dijunjung tinggi dalam masyarakat dan moral di tengah pengaruh teknologi dan kebijakan pemerintah yang semakin kuat.

Berdasarkan Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok dengan tegas menegaskan hak kebebasan pribadi warganya dalam Pasal 37, yang menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau keputusan dari kejaksaan rakyat atau pengadilan rakyat, dan harus dilakukan oleh badan keamanan publik. Pasal 38 juga melindungi martabat pribadi warga negara dengan melarang penghinaan, fitnah, atau tuduhan palsu terhadap mereka. Selanjutnya, Pasal 40 juga menegaskan perlindungan terhadap kebebasan rakyat China sesuai dengan hukum (Konstitusi Tiongkok, 2018).

Namun, pelaksanaan beberapa kebijakan, seperti social credit, telah menimbulkan dampak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi ini. Dengan pemantauan dan publikasi data pribadi masyarakat, kepercayaan antarwarga mulai terkikis. Masyarakat menjadi lebih waspada dan curiga terhadap sesama, mengancam budaya kepercayaan yang telah lama terjaga di China.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran dalam pola interaksi sosial di masyarakat China. Ketidakpercayaan yang meningkat dapat menghambat kerjasama antarindividu, mempengaruhi relasi sosial, dan berpotensi mengubah dinamika budaya kepercayaan yang telah dianut oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Kondisi ini dapat berdampak pada stabilitas sosial dan keberlanjutan budaya kepercayaan di China.

3. Pengaruh pada Kebebasan Individu

Pemberlakuan sistem Social Credit di China telah membawa dampak signifikan terhadap kebebasan dalam bermasyarakat. Sebagai negara dengan sistem politik yang otoriter, China telah lama menghadapi pembatasan dalam hal kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, terutama jika pendapat tersebut dianggap mengganggu stabilitas sosial atau otoritas pemerintah. Dengan diperkenalkannya sistem Social Credit, pembatasan terhadap

keterbukaan informasi semakin meningkat, karena individu yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau mengkritik pemerintah dapat dikenai sanksi dalam bentuk pengurangan poin kredit.

Hal ini menciptakan suasana di mana masyarakat cenderung menahan diri dalam menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau kebijakan-kebijakan negara, karena takut akan konsekuensi yang dapat merugikan mereka secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, walaupun terdapat akses yang semakin meningkat terhadap informasi melalui internet dan media sosial, banyak individu cenderung untuk tidak memanfaatkannya sepenuhnya untuk menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan narasi resmi pemerintah.

Terlebih lagi, dalam konteks China yang merupakan negara komunis dengan kontrol yang ketat atas media dan opini publik, pemberlakuan sistem Social Credit semakin memperkuat kontrol pemerintah terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ini dapat mengurangi keberanian individu untuk mengungkapkan pandangan atau kritik yang berpotensi merugikan posisi pemerintah atau stabilitas sosial, karena mereka sadar bahwa hal tersebut dapat berdampak negatif pada skor kredit mereka dan akibatnya, hak-hak dan akses mereka dalam masyarakat dapat terbatas.

Secara keseluruhan, pemberlakuan sistem Social Credit di China telah menghadirkan tantangan baru terkait keterbukaan informasi dan kebebasan berbicara dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang berani menyuarakan pendapat yang berbeda dengan narasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka, pada Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok pasal 37, pasal 38 dan pasal 40 yang berkaitan dengan kebebasan individu sangat bertolak belakang dengan yang terjadi kepada masyarakat setelah kebijakan ini ditetapkan.

IV. KESIMPULAN

Dengan pemberlakuan sistem Social Credit di Tiongkok, terjadi transformasi besar dalam cara pemerintah mengelola dan menilai

perilaku masyarakatnya. Sejarah sistem kredit sosial di Tiongkok memiliki akar yang dapat ditelusuri kembali ribuan tahun, dengan pengaruh dari berbagai aliran pemikiran seperti Konfusianisme, Mohisme, dan Legalisme. Namun, konsep modern dari sistem ini mulai berkembang pada akhir tahun 1990-an, dengan fokus awal pada masalah ekonomi seperti gagal bayar utang dan pelanggaran kontrak.

Peristiwa yang dialami oleh masyarakat China terkait dengan Social Credit System menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan individu. Melalui dua kasus yang disajikan, yaitu Dandan Fan dan Xu Xiaodong, dapat dilihat bahwa sistem ini dapat memberikan hasil yang beragam, dari manfaat hingga konsekuensi negatif, dimana seseorang yang patuh terhadap kebijakan dan mendapatkan poin kredit tinggi mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan, sedangkan sebaliknya untuk seseorang yang berlawanan dengan kebijakan akan mendapatkan poin kredit rendah dan mendapatkan banyak kerugian dalam kehidupannya, serta kebijakan ini mempengaruhi poin kerabat sekitar atau orang yang berinteraksi dengan seseorang tersebut.

Sistem ini menggambarkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan sosial dan meningkatkan kepercayaan, sekaligus menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum. Namun, dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek kepatuhan dan etika, tetapi juga merasuk ke dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat Tiongkok. Sistem ini menciptakan dinamika baru dalam interaksi sosial, di mana individu dengan skor kredit rendah mungkin mengalami penolakan atau diskriminasi, sementara individu dengan skor kredit tinggi lebih dihormati dan dianggap dapat diandalkan.

Selain itu, pemberlakuan sistem ini juga membawa konsekuensi terhadap kebebasan individu, dengan pembatasan yang semakin meningkat terhadap keterbukaan informasi dan kebebasan berbicara, terutama dalam konteks negara otoriter seperti Tiongkok. Berdasarkan pasal 33, 35, 38, 40 dan 41 Konstitusi Rakyat Tiongkok, kebijakan ini menentang konstitusi yang telah diberlakukan sejak tahun 2018 tersebut

karena menekan kebebasan individu dan membuka informasi atau hak privasi Masyarakat. Oleh karena itu, meskipun sistem Social Credit mungkin memiliki manfaat tertentu dalam meningkatkan kedisiplinan sosial, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang harga yang harus dibayar dalam hal privasi, kebebasan, dan hak asasi individu.

DAFTAR REFERENSI

- Aaron O’neill. (2024). Twenty countries with the largest population in 2024. Statista.
- Amanda Lee. (2020). Apa sistem kredit sosial China dan mengapa itu kontroversial? South China Morning Post.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bob Widyahartono. (2024). *Etos dan Etika Kerja Bangsa-bangsa Asia Timur*. Yayasan Nabil.
- Creemers, R. (2018). China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control. SSRN Electronic Journal.
- Drew Donnelly, P. (2024). *Penjelasan Sistem Kredit Sosial Tiongkok – Apa Itu & Bagaimana Cara Kerjanya?* Horizons.
- Genia Kostka. (2019). What do people in China think about ‘social credit’ monitoring? The Washington Post.
- Jakob, S. (2021). The corporate social credit system in China and its transnational impact. *Transnational Legal Theory*, 12(2), 294–314.
- Konstitusi Tiongkok. (2018, March 18). *Konstitusi Tiongkok (2018)*. Kongres Rakyat Nasional.
- Mareike Ohlberg, Shazeda Ahmed, & Bertram Lang. (2017). *CENTRAL PLANNING, LOCAL EXPERIMENTS* The complex implementation of China’s Social Credit System. MERICS CHINA MONITOR.
- Matthew Carney. (2018). Leave no dark corner. ABC NEWS.

- Nicolas Atkin. (2019, June 19). Censored MMA fighter Xu Xiaodong says he'll leave China to become an Australian citizen.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Sayid Muhammad Rifqi Noval. (2020). Ancaman Terhadap Perlindungan Data Pribadi pada Era Keterbukaan Informasi : Telaah Awal Kebijakan Social Credit System Tiongkok. *Prosiding Politeknik Negeri Jakarta*, 1.
- Stephen McDonell. (2021, September 24). Mengapa Xi Jinping memimpin China kembali ke sosialisme setelah berkembang dalam “kapitalisme versi Tiongkok.” *BBC News*, Beijing.
- Vincent Ni, & Yitsing Wang. (2020, November 26). China pasang ratusan juta CCTV, mungkinkah warganya menghindari kamera-kamera pengawas itu? *BBC WORLD SERVICE*.
- Zhang Lihua. (2013). *China's Traditional Cultural Values and National Identity*. Carnegie Endowment For International Peace.